



DOI: <https://doi.org/10.38035/jsmd.v2i4>

Received: 22 Desember 2024, Revised: 30 Desember 2024, Publish: 16 Januari 2025

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Strategi Percepatan Capaian Kinerja Penyuluh Perikanan (Studi Kasus Pada Balai Riset Perikanan Perairan Umum Dan Penyuluhan Perikanan Palembang)

Nurwanti¹, Dina Muthmainnah², Ni Komang Suryati³, Melfa Marini⁴, Andi Soesmono⁵, Rezki Antoni⁶

¹Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Palembang, Indonesia, nurwanti.dewangga@gmail.com

²Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Palembang, Indonesia, dina.gofar@yahoo.co.id

³Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Palembang, Indonesia, komangnks16@gmail.com

⁴Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Palembang, Indonesia, melfa_marini@yahoo.com

⁵Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Indonesia, ansoes_69@yahoo.co.id

⁶Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Palembang, Indonesia, rezki.antoni.s@gmail.com

Corresponding Author: nurwanti.dewangga@gmail.com¹

Abstract: *Research Institute for Inland Fisheries and Extensions (BRPPUPP) is a Technical Implementation Unit of the Ministry of Marine Affairs and Fisheries in the field of inland fisheries research and fisheries extension. Since the issuance of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government, the affairs of the implementation of fisheries extension are then the affairs of the Central Government, namely the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries (KKP). BRPPUPP is one of the extension that oversees 5 provinces namely South Sumatra, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, and Bengkulu with a total number of 468 extension workers as of January 2024. Extension is oriented towards increasing knowledge, skills and attitudes. The potential of existing fisheries resources will be optimally utilized if supported by various factors, including fisheries extension and the human resources of the main fisheries actors who are the beneficiaries of the extension. Based on the SWOT analysis, the following recommendations are divided into short-term, with recruitment to address the shortage of extension workers, medium-term with effective coaching and extension integrated with information technology through the development of a comprehensive digital platform and real-time monitoring and evaluation system, and long-term with Extension competencies to deal with the limitations of extension services.*

Keywords: *performance achievement, extensions, marine and fisheries.*

Abstrak: Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan (BRPPUPP) merupakan UPT Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan. Sejak diterbitkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan selanjutnya menjadi urusan Pemerintah Pusat yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). BRPPUPP menjadi salah satu satminkal penyuluhan yang membawahi 5 provinsi yaitu Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, dan Bengkulu dengan total jumlah penyuluh sebanyak 468 orang per Januari 2024. Penyuluhan berorientasi kepada peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Berdasarkan analisis SWOT, terdapat rekomendasi yang dibagi menjadi jangka pendek, dengan rekrutmen untuk mengatasi kekurangan penyuluh, jangka menengah dengan pembinaan dan penyuluhan yang efektif diintegrasikan dengan teknologi informasi melalui pengembangan platform digital komprehensif serta sistem monitoring dan evaluasi real-time, dan jangka panjang dengan kompetensi penyuluh yang ditingkatkan melalui pusat pelatihan khusus dan kurikulum pelatihan berkesinambungan. Kualitas dan aksesibilitas materi penyuluhan ditingkatkan melalui platform online dan kerjasama dengan universitas, lembaga penelitian, dan organisasi non-pemerintah. Sarana dan prasarana penyuluhan diperbaiki dengan peningkatan anggaran dan kebijakan yang mendukung infrastruktur penyuluhan. Legislasi dan regulasi dioptimalkan dengan mengadvokasi regulasi yang mendukung kegiatan penyuluhan dan memastikan regulasi yang ada memenuhi kebutuhan di lapangan.

Kata kunci: capaian kinerja, penyuluh, kelautan dan perikanan.

PENDAHULUAN

Perikanan, sebagai sektor pembangunan yang berfokus pada pemanfaatan sumber daya ikan, bisa menjadi pilar keunggulan komparatif negara dalam meningkatkan kemakmuran ekonomi masyarakat. Paradigma pembangunan perikanan ini memerlukan berbagai penyesuaian dalam menghadapi dinamika masyarakat di era globalisasi ekonomi. Masyarakat perlu mampu memanfaatkan potensi sumber daya perikanan di daerah mereka sehingga dapat menjadi penggerak ekonomi. Potensi sumber daya perikanan yang ada akan termanfaatkan secara optimal jika didukung oleh berbagai faktor, termasuk penyuluhan perikanan dan sumber daya manusia pelaku utama perikanan yang menjadi penerima manfaat dari penyuluhan tersebut (Ticoalu *et al.*, 2013; Rosiah *et al.*, 2018).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Penyuluhan perikanan adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama serta Pelaku Usaha perikanan agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan, yang selanjutnya disingkat BRPPUPP, berdiri sejak tahun 1969, merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset perikanan perairan umum daratan dan penyuluhan perikanan. BRPPUPP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan.

Sejak diterbitkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan penyelenggaraan penyuluhan perikanan selanjutnya menjadi urusan Pemerintah Pusat yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Setelah melalui serangkaian proses identifikasi dan verifikasi Personel, Pendanaan, Prasarana dan Dokumen (P3D), maka sejak Oktober 2016 seluruh penyuluh perikanan pengangkatan daerah secara status akan berubah

menjadi penyuluh pusat. Penyuluh perikanan resmi bergabung dengan BRPPUPP pada tahun 2017. Terbitnya PERMEN KP RI Nomor 24/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan membuat struktur Organisasi BRPPUPP Palembang Tahun 2017 bertambah dengan adanya Seksi Penyuluhan.

Penyuluhan berorientasi kepada peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap. Pengetahuan dikatakan meningkat bila terjadi perubahan dari tidak tahu menjadi tahu dan yang sudah tahu menjadi lebih tahu. Keterampilan dikatakan meningkat bila terjadi perubahan dari yang tidak mampu menjadi mampu dalam usahanya. Sikap dikatakan meningkat, bila terjadi perubahan dari yang tidak mau menjadi mau dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan dan peluang usaha yang diciptakan. Pergeseran orientasi penyuluhan zaman sekarang saat ini sudah mengarah kepada peningkatan produksi usaha berbasis bisnis perikanan (Parmono *et al.*, 2018).

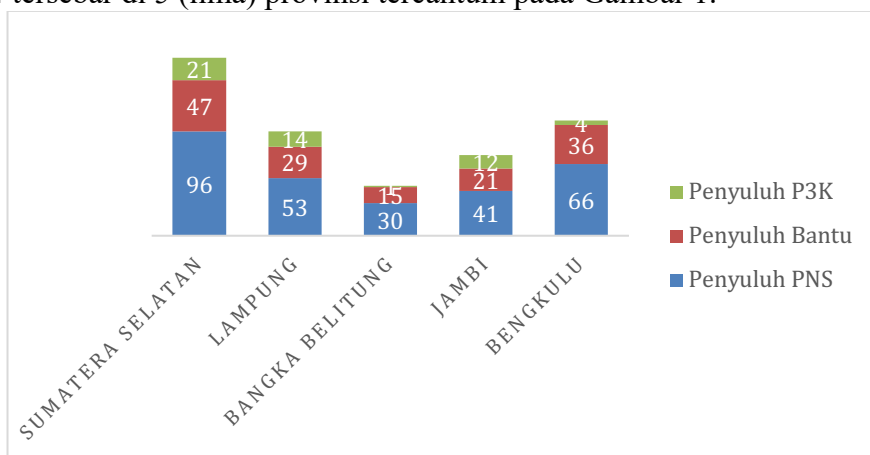
Tujuan penulisan ini adalah memberikan gambaran mengenai strategi percepatan kinerja dari penyuluh perikanan lingkup BRPPUPP Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan sasaran yaitu sistem penyuluhan yang bersinergi dan harmoni antara kepentingan pelaku utama, pelaku usaha dan stakeholder sektor kelautan dan perikanan dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kesejahteraan masyarakat.

METODE

Metode yang akan dipakai adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang dipakai untuk meneliti pada keadaan objek ilmiah di mana instrumen kuncinya adalah peneliti itu sendiri (Sugiyono, 2005). Unit analisis datanya adalah penyuluh perikanan di Satuan Administrasi Pangkalan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan yang tersebar di Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Jambi, dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Data penelitian didapatkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Dan data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Studi kasus dilakukan di wilayah kerja penyuluh perikanan yang ada di Satuan Administrasi Pangkalan Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BRPPUPP berperan sebagai Satuan Administrasi Pangkalan (SATMINKAL) yang membawahi 5 Provinsi di Pulau Sumatera yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung dan Lampung. Saat ini jumlah penyuluh perikanan PNS sebanyak 286 orang, 148 orang penyuluh perikanan bantu, dan 52 orang P3K perbulan Januari 2024. Penyuluh Perikanan di Satminkal Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan per Januari 2024 tersebar di 5 (lima) provinsi tercantum pada Gambar 1.



Sumber: Laporan Triwulan I Tahun 2024 BRPPUPP Palembang
Gambar 1. Keragaan Penyuluh Perikanan Satminkal BRPPUPP

Kegiatan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan di Triwulan 1 Tahun 2024 di Satminkal BRPPUPP Palembang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendampingan Kelompok Kelautan dan Perikanan
2. Penumbuhan Kelompok Perikanan
3. Peningkatan Kelas Kelompok Perikanan

Capaian Kinerja Penyuluhan BRPPUPP tahun 2024 sampai dengan bulan Maret 2024 tercantum pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Capaian kegiatan penyuluh perikanan BRPPUPP sampai dengan Maret 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	5.600	1.110	19,82
2	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	233	6	2,69
3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	530	131	24,71

Sumber: Laporan Triwulan I Tahun 2024 BRPPUPP Palembang

Realisasi dari ketiga indikator kinerja terhadap capaian tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan. Indikator dengan capaian terendah adalah peningkatan kelas kelompok kelautan dan perikanan, dengan persentase hanya 2,69%, sementara capaian tertinggi adalah pembentukan kelompok kelautan dan perikanan, dengan persentase 24,71%. Kinerja keseluruhan menunjukkan perlunya evaluasi dan strategi baru untuk mencapai target yang lebih baik.

Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja tersebut, seluruh target kegiatan penyuluhan perikanan pada Triwulan 1 untuk semua IKU Satminkal BRPPUPP sudah di atas 25 persen tercapai, dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Capaian target kegiatan penyuluhan perikanan pada Triwulan 1 tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Jumlah Kelompok Pelaku Utama/ Pelaku Usaha yang Disuluh di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	900	1.110	123,33
2	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Ditingkatkan Kelasnya di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	5	6	120
3	Kelompok Kelautan dan Perikanan yang Dibentuk di Satminkal BRPPUPP (Kelompok)	70	131	187,14

Sumber: Laporan Triwulan I Tahun 2024 BRPPUPP Palembang

Realisasi dari ketiga indikator kinerja tersebut melebihi target yang ditetapkan. Indikator dengan capaian tertinggi adalah pembentukan kelompok kelautan dan perikanan, dengan persentase 187,14%. Ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam pembentukan kelompok baru. Pencapaian yang baik juga terlihat pada indikator penyuluhan kelompok pelaku utama/pelaku usaha dan peningkatan kelas kelompok kelautan dan perikanan, masing-masing dengan persentase capaian sebesar 123,33% dan 120%. Kinerja keseluruhan menunjukkan bahwa target tidak hanya tercapai tetapi juga terlampaui dengan signifikan.

Analisis swot

Dari semua target dalam Indikator Kinerja Utama BRPPUPP yang sudah mencapai target Triwulan 1 Tahun 2024. Untuk menghasilkan rekomendasi strategis, metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan analisis SWOT. Metode analisis deskriptif digunakan untuk analisa faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan hambatan), sedangkan analisis SWOT digunakan untuk analisa strategi percepatan capaian kinerja.

Tabel 3 menunjukkan faktor internal sedangkan Tabel 4 menunjukkan faktor eksternal yang dapat dideskripsikan:

Tabel 3. Faktor Internal

Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weaknesses)
Capaian Melebihi Target: Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh dan ditingkatkan kelasnya telah melampaui target, menunjukkan efektivitas program penyuluhan.	Kurangnya Penyuluh Perikanan: Jumlah penyuluh perikanan tidak mencukupi dibandingkan dengan jumlah pelaku utama yang perlu disuluh.
Pembinaan dan Penyuluhan yang Efektif: Penyuluh perikanan sudah melakukan pembinaan dan penyuluhan yang baik sehingga banyak kelompok yang sudah memenuhi syarat untuk peningkatan kelas.	Alih Tugas dan Kompetensi: Masih terjadi alih tugas penyuluh PNS ke jabatan lain dan kompetensi sebagian penyuluh belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Pembentukan Kelompok Baru: Pencapaian pembentukan kelompok baru yang signifikan menunjukkan kemampuan penyuluh dalam mendampingi dan menyiapkan calon kelompok.	Penyebaran Tidak Merata: Penyebaran penyuluh perikanan tidak merata di semua kabupaten/kota dengan potensi perikanan.
Profil Kelompok yang Terupdate: Profil kelompok yang sesuai format dan terupdate mendukung akurasi dan kecepatan dalam pencapaian target.	Akses Terbatas pada Teknologi dan Sumber Daya: Penyuluh perikanan sulit mendapatkan akses terhadap teknologi, informasi pasar, modal, dan sumber daya lainnya.
	Kualitas Materi Penyuluhan: Kuantitas dan kualitas materi penyuluhan masih terbatas dalam hal aksesibilitas.
	Sarana dan Prasarana yang Tidak Memadai: Sarana dan prasarana penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh.
	Pembiayaan Terbatas: Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih terbatas.
	Legislasi dan Regulasi yang Belum Optimal: Legislasi dan regulasi belum seluruhnya tersedia dan optimal.

Tabel 4. Faktor Eksternal

Peluang (Opportunities)	Ancaman (Threats)
<p>Dukungan Kebijakan dan Regulasi: Kesempatan untuk mendapatkan dukungan dari pemangku kebijakan terkait solusi kendala penyebaran penyuluh dan peningkatan kompetensi.</p> <p>Penggunaan Teknologi Informasi: Pengembangan mekanisme kontrol kinerja dan aktivitas penyuluh melalui teknologi informasi dapat mengatasi masalah jarak dan distribusi penyuluh.</p> <p>Peningkatan Pelatihan dan Diklat: Kesempatan untuk meningkatkan kompetensi penyuluh melalui diklat fungsional dan teknis yang lebih banyak dan sesuai kebutuhan lapangan.</p> <p>Kerjasama dengan Pihak Terkait: Melibatkan lebih banyak pihak terkait dalam kegiatan penilaian dan pembinaan kelompok.</p>	<p>Mutasi dan Pensiun Penyuluh: Penurunan jumlah penyuluh perikanan karena mutasi dan pensiun yang tidak diimbangi dengan penambahan penyuluh baru.</p> <p>Keterbatasan Sumber Daya: Keterbatasan akses terhadap teknologi, informasi pasar, modal, dan sumber daya lainnya dapat menghambat efektivitas penyuluhan.</p> <p>Ketidakseimbangan Peran Pemerintah Daerah: Batasan peran pemerintah daerah yang kadang melampaui batas kewenangan dapat menghambat pelaksanaan penyuluhan.</p> <p>Aplikasi Kinerja yang Berlebihan: Terlalu banyak aplikasi kinerja yang harus digunakan dapat membebani penyuluh dan mengurangi fokus pada tugas utama mereka.</p> <p>Penyesuaian Target yang Mendadak: Penyesuaian target IKU dan penambahan format data dukung IKU yang mendadak dapat menimbulkan kebingungan dan menambah beban kerja penyuluh.</p>

Analisis SWOT merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats) untuk program percepatan kinerja penyuluh perikanan, tercantum pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Strategi dari Analisis SWOT

	Strengths (S)	Weakness (W)
Opportunities (O)	<p>Strategi SO:</p> <p>Memanfaatkan Capaian Melebihi Target untuk Mendapatkan Dukungan Kebijakan dan Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan data pencapaian yang melebihi target sebagai bukti efektivitas program untuk mengajukan peningkatan dukungan dari pemangku kebijakan. • Menyusun laporan terperinci yang menunjukkan keberhasilan program dan menyarankan kebijakan baru yang mendukung penyebaran penyuluh dan peningkatan kompetensi. <p>Mengintegrasikan Pembinaan dan Penyuluhan yang Efektif dengan Teknologi Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan aplikasi dan platform digital untuk mendukung pembinaan dan penyuluhan yang sudah efektif, sehingga dapat diakses lebih luas dan efisien. • Menggunakan teknologi untuk monitoring dan evaluasi secara 	<p>Strategi WO:</p> <p>Mengatasi Kekurangan Penyuluh dengan Dukungan Kebijakan dan Regulasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan proposal kepada pemangku kebijakan untuk menambah jumlah penyuluh perikanan melalui rekrutmen baru atau program magang. • Mendorong legislasi yang mendukung stabilitas posisi penyuluh, mengurangi alih tugas yang tidak sesuai dengan kompetensi penyuluh perikanan. <p>Meningkatkan Kompetensi Penyuluh Melalui Pelatihan dan Diklat yang Ditingkatkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi kebutuhan kompetensi di lapangan dan mengadakan diklat fungsional serta teknis yang lebih terfokus pada kebutuhan tersebut. • Mengadakan program pelatihan berkelanjutan dan mentoring bagi penyuluh yang baru dan yang kurang kompeten, bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

	Strengths (S)	Weakness (W)
	<p>real-time, memungkinkan kontrol kinerja yang lebih baik meski penyuluh tersebar di berbagai wilayah.</p> <p>Mengoptimalkan Pembentukan Kelompok Baru Melalui Pelatihan dan Diklat yang Ditingkatkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan lebih banyak pelatihan dan diklat fungsional dan teknis untuk penyuluh guna meningkatkan kemampuan mereka dalam membentuk dan mendampingi kelompok baru. • Mengembangkan modul pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan dan berbasis pada pengalaman sukses sebelumnya dalam pembentukan kelompok baru. <p>Menggunakan Profil Kelompok yang Terupdate untuk Kerjasama dengan Pihak Terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membuat database yang mudah diakses oleh pihak terkait, seperti pemerintah daerah, lembaga swasta, dan organisasi non-pemerintah, untuk mendukung kerjasama dalam penilaian dan pembinaan kelompok. • Mengadakan forum atau workshop reguler dengan pihak terkait untuk membahas perkembangan terbaru, berbagi profil kelompok, dan merencanakan kolaborasi yang lebih efektif. <p>Meningkatkan Efektivitas Penyuluhan Melalui Dukungan Teknologi Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengadopsi teknologi informasi untuk memperluas jangkauan dan dampak penyuluhan, seperti menggunakan aplikasi mobile dan platform online untuk penyuluhan jarak jauh. • Menerapkan sistem informasi manajemen yang memungkinkan penyuluh melaporkan aktivitas mereka dan mendapatkan umpan balik secara cepat dan terstruktur. 	<p>Menggunakan Teknologi Informasi untuk Memperbaiki Penyebaran dan Kontrol Penyuluh</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan aplikasi mobile dan platform digital untuk mempermudah penyuluh mengakses teknologi, informasi pasar, modal, dan sumber daya lainnya. • Menggunakan teknologi informasi untuk memonitor dan mengatur penyebaran penyuluh, memastikan setiap daerah dengan potensi perikanan mendapatkan alokasi penyuluh yang sesuai. <p>Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Materi Penyuluhan Melalui Kerjasama dengan Pihak Terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bekerjasama dengan universitas, lembaga penelitian, dan organisasi non-pemerintah untuk memperkaya materi penyuluhan dan meningkatkan aksesibilitasnya. • Mengembangkan platform online yang menyimpan berbagai materi penyuluhan yang dapat diakses dengan mudah oleh penyuluh dan pelaku utama perikanan. <p>Memperbaiki Sarana dan Prasarana Penyuluhan dengan Dukungan Kebijakan dan Pembiayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengajukan peningkatan anggaran untuk sarana dan prasarana penyuluhan kepada pemerintah dan lembaga donor. • Mendorong kebijakan yang mendukung pembangunan infrastruktur penyuluhan di daerah-daerah terpencil dan yang sulit dijangkau. <p>Mengoptimalkan Legislasi dan Regulasi untuk Mendukung Kegiatan Penyuluhan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengadvokasi penyusunan dan implementasi regulasi yang mendukung optimalisasi kegiatan penyuluhan perikanan. • Bekerjasama dengan pemerintah untuk memastikan regulasi yang ada sudah mendukung kebutuhan di lapangan dan memfasilitasi kegiatan penyuluhan secara efektif.
Threats (T)	Strategi ST: Mengatasi Mutasi dan Pensiun Penyuluh dengan Pemanfaatan Capaian yang Melebihi Target	Strategi WT: Mengatasi Kurangnya Penyuluh Perikanan dengan Mitigasi Mutasi dan Pensiun

Strengths (S)	Weakness (W)
<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan data pencapaian yang telah melebihi target sebagai dasar untuk mengajukan penambahan penyuluh baru kepada pemangku kebijakan. • Mengembangkan program kaderisasi dan pelatihan intensif untuk calon penyuluh baru, sehingga transisi akibat mutasi dan pensiun dapat berjalan lancar tanpa mengurangi efektivitas program penyuluhan. <p>Mengurangi Keterbatasan Sumber Daya dengan Profil Kelompok yang Terupdate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan profil kelompok yang terupdate untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik tiap kelompok dan mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien. • Menjalin kerjasama dengan pihak ketiga seperti lembaga swasta dan donor untuk mendapatkan tambahan akses terhadap teknologi, informasi pasar, modal, dan sumber daya lainnya. <p>Mengelola Ketidakseimbangan Peran Pemerintah Daerah dengan Pembinaan dan Penyuluhan yang Efektif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antara penyuluh dan pemerintah daerah untuk memastikan peran yang jelas dan mendukung. • Mengadakan workshop dan pelatihan bagi pemerintah daerah untuk memahami pentingnya peran penyuluh dan cara mereka dapat mendukung penyuluhan secara efektif. <p>Menyederhanakan Aplikasi Kinerja dengan Pencapaian dan Pembentukan Kelompok Baru</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan keberhasilan dalam pembentukan kelompok baru untuk menyederhanakan dan menstandarisasi aplikasi kinerja, mengurangi beban administratif bagi penyuluh. • Mengembangkan aplikasi yang lebih user-friendly dan fokus pada kebutuhan lapangan, berdasarkan 	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat program rekrutmen dan pelatihan yang berkelanjutan untuk menggantikan penyuluh yang pensiun atau pindah tugas. • Meningkatkan insentif dan kesejahteraan bagi penyuluh untuk mengurangi alih tugas ke jabatan lain. <p>Meningkatkan Kompetensi Penyuluh untuk Menghadapi Keterbatasan Sumber Daya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan pelatihan intensif dan program pengembangan kompetensi untuk penyuluh agar mereka lebih mampu mengatasi keterbatasan sumber daya. • Mengadakan pelatihan mandiri dengan bantuan teknologi seperti e-learning dan webinar untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal. <p>Mengelola Penyebaran Tidak Merata dengan Regulasi dan Kebijakan yang Lebih Efektif</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengadvokasi pemerintah untuk menyusun regulasi yang memastikan distribusi penyuluh yang lebih merata, terutama di daerah dengan potensi perikanan tinggi. • Mengimplementasikan sistem rotasi yang memastikan penyuluh tersebar merata di berbagai kabupaten/kota. <p>Meningkatkan Akses terhadap Teknologi dan Sumber Daya untuk Menghadapi Keterbatasan yang Ada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga donor untuk menyediakan akses teknologi dan sumber daya tambahan bagi penyuluh. • Mendorong pemerintah dan pemangku kebijakan untuk memberikan alokasi anggaran yang lebih besar untuk penyuluhan perikanan. <p>Memperbaiki Kualitas Materi Penyuluhan dan Sarana Prasarana untuk Mengatasi Pembiayaan Terbatas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dengan mengembangkan materi penyuluhan yang lebih efisien dan efektif. • Mengajukan proposal pendanaan kepada pemerintah dan lembaga donor untuk meningkatkan sarana dan prasarana penyuluhan.

	Strengths (S)	Weakness (W)
	<p>umpan balik dari penyuluh yang aktif.</p> <p>Menghadapi Penyesuaian Target yang Mendadak dengan Penggunaan Profil Kelompok yang Terupdate</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana kontingensi berdasarkan profil kelompok yang terupdate untuk menghadapi penyesuaian target yang mendadak, memastikan bahwa data dan informasi selalu siap digunakan. • Melakukan review berkala dan penyesuaian internal secara proaktif, agar tim penyuluh siap menghadapi perubahan target dan format data dukung IKU tanpa kebingungan. 	<p>Mengelola Aplikasi Kinerja dan Penyesuaian Target untuk Mengurangi Beban Penyuluh</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyederhanakan aplikasi kinerja dengan mengurangi jumlah aplikasi yang harus digunakan dan membuatnya lebih user-friendly. • Melakukan komunikasi yang lebih baik terkait penyesuaian target IKU dan penambahan format data dukung, serta memberikan pelatihan yang diperlukan untuk penyuluh. <p>Mengoptimalkan Legislasi dan Regulasi untuk Mendukung Pelaksanaan Penyuluhan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendorong revisi dan penyusunan legislasi serta regulasi yang lebih mendukung pelaksanaan penyuluhan perikanan. • Bekerjasama dengan pemangku kebijakan untuk memastikan regulasi yang ada tidak menghambat, tetapi mendukung kegiatan penyuluhan di lapangan.

Rekomendasi

Berdasarkan analisis SWOT tersebut, berikut adalah rekomendasi yang dibagi menjadi jangka pendek, menengah, dan panjang.

Jangka Pendek (1-2 Tahun)

Mengatasi kekurangan penyuluh karena mutasi dan pensiun penyuluh dapat dilakukan dengan mengajukan proposal rekrutmen baru. Peningkatan kompetensi penyuluh dapat dicapai melalui pelatihan intensif, dan program e-learning serta webinar untuk meningkatkan kompetensi secara mandiri, diklat yang sesuai kebutuhan lapangan, dan program mentoring dengan sebelumnya mengidentifikasi kebutuhan spesifik tiap kelompok berdasarkan profil terupdate.

Jangka Menengah (3-5 Tahun)

Pembinaan dan penyuluhan yang efektif diintegrasikan dengan teknologi informasi melalui pengembangan platform digital komprehensif serta sistem monitoring dan evaluasi real-time. Kekurangan penyuluh diatasi dengan mengimplementasikan program magang dan mendorong legislasi yang mendukung stabilitas posisi penyuluh, serta dengan mengembangkan database profil kelompok yang mudah diakses dan mengadakan workshop serta forum reguler untuk merencanakan kolaborasi.

Jangka Panjang (5-10 Tahun)

Kompetensi penyuluh untuk menghadapi keterbatasan sumber daya ditingkatkan melalui pusat pelatihan khusus dan kurikulum pelatihan berkesinambungan. Kualitas dan aksesibilitas materi penyuluhan ditingkatkan melalui platform online dan kerjasama dengan universitas, lembaga penelitian, dan organisasi non-pemerintah. Sarana dan prasarana penyuluhan diperbaiki dengan peningkatan anggaran dan kebijakan yang mendukung infrastruktur penyuluhan. Legislasi dan regulasi dioptimalkan dengan mengadvokasi regulasi yang mendukung kegiatan penyuluhan dan memastikan regulasi yang ada memenuhi kebutuhan di lapangan.

KESIMPULAN

Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan penyuluhan perikanan guna pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat sesuai dengan kemampuan sumber daya penyuluh yang tersedia termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan. Langkah percepatan pelaksanaan kegiatan penyuluhan perikanan dan pengembangan pada awal tahun anggaran dan mengkaji perkembangan permasalahan aktual perlu terus dilakukan.

REFERENSI

- Laporan Triwulan I Tahun 2024 Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang.
- Parmono, WH., A Leilani, N Nurfitriana. (2018). *Penyuluhan Perikanan*. AMAFRAD Press. Cetakan Pertama. P-ISBN: 978-623-7651-31-1 e-ISBN: 978-623-7651-33-8. 67 halaman.
- Rosiah, E., SH Poernomo, ODS Hasan. (2018). Analisis Penyuluhan Perikanan Partisipatif dan Kompetensi Pembudidaya Ikan di Kabupaten Sumedang. *Jurnal Penyuluhan Perikanan dan Kelautan*. Volume 12(1) April 2018. Hal 47-63. doi.org/10.33378/jppik.v12i1.100.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Ticoalu, DEBS., E Reppie, ATR Telleng. (2013). Analisis kebijakan pemberdayaan masyarakat perikanan tangkap di Kota Manado. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Perikanan Tangkap* 1(3): 76-80, Juni 2013. ISSN 2337-4306.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan.
- PERMEN KP RI Nomor 24/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan.